

KPK Lelang Puluhan HP Hasil Rampasan Terpidana Koruptor

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KP-KNL) Jakarta III melelang berbagai macam barang hasil rampasan dari para terpidana perkara korupsi. Barang-barang yang dilelang meliputi berbagai merek handphone hingga tas kerja.

"KPK bersama dan melalui KPKNL Jakarta III akan melaksanakan lelang barang rampasan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*e-auction*) berdasarkan putusan Majelis Pengadilan Tipikor," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (27/3/2023).

Adapun, barang-barang yang bakal dilelang merupakan milik terpidana Tasdi, Waryono Karno, Muhammad Tamzil, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Analisman Zalukhu dan Sopar Siburian. Kemudian, Satriawan Sulaksono, Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor, Neneng Rahmi Nurlaili, Apip Kusnadi, M Fauzi NS, dan Edi Junaidi.

Handphone yang dilelang dari berbagai merek dan model. Selain handphone, juga dilelang sejumlah tas dan ransel.

Lelang akan dilaksanakan KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO, Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusa, pada Rabu, 29 Maret 2023 dengan jenis penawaran closed bidding. Adapun, batas akhir penawaran hingga pukul 09.25 WIB. Bagi yang berminat bisa langsung mendaftar di alamat domain www.lelang.go.id. ● **mei**

Tersangka Baru Kasus Korupsi di Kementerian ESDM

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus baru terkait korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kasus tersebut dalam proses penyidikan dan sudah ada tersangka.

"Sudah ada tersangka," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (27/3).

KPK saat ini masih mencari bukti tambahan berkaitan dengan kasus tersebut dengan melakukan pengecekan di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mine-

ral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Senin (27/3).

"Informasi yang kami peroleh, betul ada kegiatan pengeledahan oleh tim KPK di kantor kementerian ESDM," beber Ali.

Belum diketahui apa saja yang diamankan dalam pengeledahan tersebut. Ali hanya memastikan bahwa pengeledahan tersebut berkaitan dengan kasus baru dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

"Terkait kegiatan penyidikan baru oleh KPK atas dugaan korupsi di kementerian ESDM," ungkapnya. ● **mei**

Apapun yang Berupa Lambang Parpol Tak Boleh Ada di Tempat Ibadah

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan, apapun yang berupa lambang partai tidak diperkenankan berada di tempat ibadah.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kasus bagi-bagi amplop yang dilakukan kader PDI-P di dalam masjid di Sumenep, Jawa Timur, belum lama ini.

"Yang kemudian menandakan lambang partai di dalam tempat ibadah tidak diperkenankan," ujar Bagja kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Said Abdullah mengakui, dalam video yang tengah viral itu, dia bersama dengan pengurus cabang PDI-P se-Madura "tengah membagikan sembako" sebanyak 175.000 ke warga miskin pada 24-27 Maret 2023.

Ia mengklaim, sebagian paket sembako dibagikan dalam bentuk uang tunai dan hal itu "diniatkan sebagai zakat" sejak 2006. Secara khusus, ia menyoroti bahwa yang tidak diperkenankan itu adalah lambang partai di tempat masjid yang bersifat publik, bukan milik keluarga tertentu.

"Kenapa ada logo PDI Perjuangan? Sebab, sebagian kader bergotong royong dan itu juga diniatkan zakat mal," klaim Said.

Bagja menegaskan bahwa dalih itu tidak membenarkan perbuatan bagi-bagi amplop berisi uang Rp 300.000 di masjid itu. Ia bahkan mengklaim akan meminta pendapat ahli zakat soal itu.

"Enggak boleh lah tetap. Kalau zakat kan kita enggak mau larang orang berzakat. Enggak boleh, apalagi di bulan Ramadhan," katanya.

Saat ini, Bawaslu menyebut pihaknya masih melakukan penelusuran melalui Bawaslu Sumenep, untuk mengkaji ada atau tidaknya unsur pelanggaran dari kejadian ini. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) berbicara saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3). RDP tersebut membahas putusan Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

Mahfud Disebut Berpolitik jika Tak Tuntasakan Transaksi Mencurigakan Rp349 T di Kemenkeu

Anggota DPR khawatir jika pernyataan Mahfud soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu hanya sekadar letupan tanpa ada tanggungjawab.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bermain politik jika tak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya soal laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud diminta membuka seterang-terangnya laporan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun tersebut hingga tuntas.

"Supaya dia buka, untuk membangun Indonesia bersih, tapi kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omong, maka saya menilai, saya menganggap Pak Mahfud telah

bermain politik," kata Benny ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Benny K Harman khawatir laporan yang disampaikan Mahfud tak tuntas. Terlebih, politikus dari Partai Demokrat ini khawatir jika pernyataan Mahfud hanya sekadar letupan tanpa ada tanggungjawab.

"Untuk apa dia mau ungkapkan itu, tapi enggak tuntas, enggak jelas, ya kan? Bikin letupan-letupan begitu saja. Buka saja sekalian," ujarnya.

Benny mengaku kecewa dalam rapat yang tak dihadiri olehnya, bukan karena tidak mendukung penyelesaian dugaan transaksi mencurigakan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa mendukung pe-

nyelesaian laporan itu secara terang benderang.

"Tapi saya minta dia kalau ini sudah dibuka ya kita dukung, pertanyaan-pertanyaan saya ini maksudnya untuk mendukung dia," kata Benny.

Mahfud MD merespons undangan Komisi III DPR RI terkait rapat pembahasan temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu. Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengaku siap menghadiri rapat tersebut. Ia pun berharap, tidak terjadi perubahan jadwal rapat.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang Saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir," kata Mahfud, dikutip dari cuitan *Twitter*-nya, Senin (27/3).

Bahkan Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya

dalam gelaran Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan.

Tiga nama anggota Komisi III DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.

"Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud.

Melansir laman DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bakal dilaksanakan

pada Rabu (29/3), pukul 15.00 WIB S.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (21/3) pekan lalu.

Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi III DPR RI.

Pada akhirnya, rapat itu memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Pulyani Indrawati, dan PPATK. Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. ● **han**

Pertemuan Airlangga dan Surya Paloh Diakui untuk Perdalam Kemungkinan Koalisi Besar

JAKARTA (IM) - Partai Golkar akhirnya mengakui bahwa pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada acara buka puasa bersama (bukber) di Nasdem Tower, Sabtu (25/3), turut membahas kemungkinan adanya koalisi besar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ketika ditanya apakah pertemuan tersebut sarat lobi-lobi politik untuk memperbesar koalisi.

"(Pertemuan) memperdalam kemungkinan-kemungkinan untuk bisa melakukan kerja sama, itu saja," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Pertemuan dengan Surya Paloh tentu tak dilakukan sekali. Untuk membangun kerja sama, jelas Doli, diperlukan pertemuan sebanyak mungkin dengan tokoh-tokoh partai politik.

"Enggak bisa sekali ketemu. Banyak yang diperbincangkan, didiskusikan untuk menyamakan visi dan platform itu. Jadi diskusinya panjang dan bisa berkali-kali," jelasnya.

Doli berharap pertemuan itu mampu membawa partai-partai politik lain bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ketua Komisi II DPR ini mengaku Partai Golkar tak memiliki target pasti berapa partai yang bisa bergabung pada akhirnya ke KIB. Namun, ia menyatakan Golkar akan menjajaki sebanyak mungkin partai demi terwujudnya koalisi besar itu.

"Makanya kita bagaimana mengumpulkan sebanyak-

banyaknya energi untuk bisa menang. Salah satu bagian dari mengumpulkan energi itulah sebagaimana sebanyak-banyaknya parpol bisa bergabung bersama koalisi kami," tutur Doli.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga dan Surya Paloh bertemu dalam acara buka puasa bersama di Nasdem Tower. Saat ditanya soal kemungkinan terbentuknya koalisi besar dalam Pilpres 2024, Airlangga hanya menjawab koalisi besar biasanya menguntungkan. Namun, Airlangga belum dapat memastikan apakah koalisi besar tersebut akan terbentuk.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya," sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Saat ini, Partai Golkar yang dipimpin Airlangga telah membentuk koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi tersebut dinamai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sedangkan Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah bersatu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Kendati berbeda koalisi, ia mengaku tetap menjaga jalinan komunikasi antar partai.

"Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut," jelas Airlangga Hartarto, pasca buka puasa bersama para elite partai politik (parpol) di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3). ● **han**

Ke Istana, Kepala PPATK Ngaku Dapat Arahan Khusus dari Presiden Jokowi

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustianandana, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

Beberapa hari ini masyarakat Indonesia gaduh soal isu transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu. Awalnya, transaksi janggal yang diungkap ke publik hanya Rp300 triliun.

Ivan pun mengaku telah menyampaikan transaksi janggal TPPU Rp300 triliun ke Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Saat rapat kerja dengan

Komisi III DPR RI pada Selasa 21 Maret 2023, Kepala PPATK Ivan Yustianandana mengatakan bahwa informasi yang beredar soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun ada di Kemenkeu tidak tepat. Menurut Ivan, transaksi tersebut terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

"Itu kebanyakan terkait dengan kasus ekspor impor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor, bisa ada lebih dari Rp100 triliun, Rp40 triliun," kata Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa 21 Maret 2023. ● **han**



DODY PRAWIRANEGARA DITUNTUT 20 TAHUN PENJARA

Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara (kanan) menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3). JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut mantan Kapolres Bukittinggi tersebut dengan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp2 miliar subsidi enam bulan kurungan dalam kasus peredaran narkoba yang juga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Salatiga
Jalan Jenderal Sudirman Atrium Plaza
Salatiga - 50712

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Semarang (024) 8412152

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa akan dilakukan penjualan/pengalihan atas seluruh saham ("Akuisisi") dalam PT. KENCANA MULTIMAS JAVATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi dan beralamat di Jalan Bulusari, Dsn Sidomukti, Yosomulyo, Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ("Perseroan") kepada Tuan SUKOWIN sebesar 60% (enam puluh persen) dan Tuan AKRI RAWAN sebesar 40% (empat puluh persen), sehingga mengakibatkan perusahaan pengendalian saham atas Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pihak yang berkeberatan atas rencana Akuisisi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai bukti yang sah kepada Direksi Perseroan ke alamat tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 28 Maret 2023

Direksi Perseroan